



POSISI RUSIA DAN PERKEMBANGAN KRISIS UKRAINA

Adirini Pujayanti*)

Abstrak

Ukraina bersama Georgia dan Moldova telah menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa (UE) yang memberikan mereka akses ke pasar tunggal Eropa. Bagi Ukraina kesepakatan dagang dengan UE merupakan langkah penting dan awal baru di tengah ketidakstabilan politik di negaranya. Rusia, negara berpengaruh di Eropa Timur, tidak menyukai terjadinya kesepakatan tersebut. Krisis di Ukraina pun kemudian berkembang, termasuk munculnya gerakan separatisme pro Rusia di wilayah timur Ukraina. Krisis Ukraina yang semula instabilitas dalam negeri berkembang semakin memburuk sehingga menjadi masalah krisis yang mengancam hubungan antar-negara.

Pendahuluan

Ukraina, yang merupakan negara eks Uni Soviet semakin bersikap pro Barat dengan menandatangani kerja sama kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa (UE). Kerja sama Ukraina dengan UE menawarkan kesempatan kepada semua pihak untuk bekerja sama demi masa depan yang lebih aman, dan memastikan secara tegas keanggotaan Ukraina di dalam UE. Meskipun penandatanganan kerja sama tersebut merupakan hak berdaulat setiap negara, Rusia yang kecewa dengan kebijakan Ukraina telah memperingatkan negara tersebut akan ada konsekuensi serius yang harus dihadapi pasca penandatanganan

kerja sama itu. Pihak Rusia menilai blok ekonomi yang terbentuk itu merugikan perekonomiannya.

Upaya kerja sama Ukraina dengan UE ini telah ditempuh melalui proses yang tidak mudah. Di masa pemerintahan mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich upaya ini digagalkan, sehingga ia dijatuhkan dari pemerintahannya Februari 2014. Pelengseran Presiden Ukraina Viktor Yanukovich yang merupakan sekutu Rusia, dibalas Rusia dengan mendukung gerakan pemisahan diri Crimea dari Ukraina. Langkah Crimea yang melepaskan diri dari negara Ukraina dengan dukungan Rusia, kemudian diikuti oleh

*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI. E-mail: apujayanti@yahoo.com.



wilayah-wilayah lain di timur Ukraina yang penduduknya sehari-hari memang berbahasa Rusia.

Di bulan April, gerakan separatisme pro Rusia di wilayah administrasi Donetsk dan Luhansk di timur Ukraina menyatakan kemerdekaannya. Konflik yang telah menewaskan sekitar 450 jiwa tersebut, kembali memanas setelah upaya perpanjangan gencatan senjata yang diusulkan UE gagal dipenuhi. UE memberikan ultimatum kepada Rusia untuk mendukung rencana perdamaian yang diprakarsai UE atau menghadapi sanksi yang lebih keras dari UE. Sanksi baru yang mungkin akan diterapkan UE adalah pembekuan aset bagi setiap pihak yang melanggar kesepakatan.

Rusia vs Barat

Pihak Barat menuduh Rusia bermaksud memecah belah bekas wilayah Uni Soviet tersebut. Intervensi Rusia dalam masalah Ukraina dinilai tidak sesuai dengan norma-norma internasional. Rusia yang telah mendapat sanksi ekonomi dari Barat menolak tuduhan tersebut. Meski majelis tinggi parlemen Rusia telah membatalkan resolusi yang memungkinkan penggunaan kekuatan militer di Ukraina atas permintaan Presiden Vladimir Putin, sikap keras Rusia telah memunculkan reaksi negatif di pihak UE.

Sebanyak 28 pemimpin UE menyatakan Rusia harus mengambil keputusan untuk mendukung rencana perdamaian Ukraina. Rusia diminta mengambil langkah efektif untuk berhenti mendestabilisasi Ukraina, menciptakan kondisi aman untuk rencana perdamaian yang akan dilaksanakan dan mengakhiri dukungannya kepada kelompok separatis bersenjata. UE juga menuntut agar gerakan separatis pro Rusia setuju untuk melakukan verifikasi gencatan senjata, mengembalikan pos pemeriksaan perbatasan ke Ukraina, membebaskan sandera, dan meluncurkan pembicaraan serius pada pelaksanaan rencana perdamaian yang diajukan oleh Presiden Ukraina Petro Poroshenko.

Hubungan Rusia dan Amerika Serikat (AS) berada pada titik terendah menyusul perselisihan konflik di Ukraina. Krisis Ukraina dan sikap agresif baru Rusia

telah menggoyang peta diplomasi dunia dan memaksa Presiden AS Barack Obama untuk mengkaji ulang kebijakan politik luar negerinya. Dalam jangka panjang, bentrokan Barat dengan Rusia atas serangan di Ukraina bisa mendekati bentukan Perang Dingin. Jika terjadi, implikasinya akan meluas dan berskala global. Upaya Obama guna mengurangi senjata nuklir, yang banyak membuat kemajuan, kini justru diragukan. Gagasan soal sistem pertahanan rudal di Eropa sepertinya akan mendapat lebih banyak perhatian.

Presiden Putin, dan keinginannya untuk mengembalikan dominasi imperial negara-negara pecahan Uni Soviet dengan nama *New Rusia*, akan mendatangkan tantangan geopolitik. Tidak hanya bagi negara-negara tetangga Rusia, tetapi AS atas Eropa. Presiden AS direncanakan menghabiskan banyak waktu di Eropa agar dapat memenuhi permintaan negara-negara Eropa Timur akan kehadiran personel Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Harapan itu, pada gilirannya, memperumit janji AS di Asia dan tantangan bagi mitra Asia, bahwa mereka tetaplah prioritas AS.

Menanggapi sikap Rusia, NATO sepakat untuk meningkatkan anggaran militer. Selain itu, ada keinginan untuk belanja pertahanan yang lebih tinggi di pihak pemerintahan Presiden Barack Obama dengan menambah pengajuan anggaran sebesar US\$ 1 miliar dalam pengeluaran pertahanan untuk Eropa kepada Kongres. Negara-negara UE sendiri belum mengumumkan sejauhmana mereka akan meningkatkan anggaran militernya.

Sanksi Ekonomi dan Faktor Gas Alam Rusia

Perubahan kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin disebabkan tekanan sanksi ekonomi Barat. Serangkaian sanksi dijatuhkan oleh UE dan AS. Oleh karena itu, AS telah mengumumkan adanya pelarangan visa serta pemblokiran aset kepada pejabat Rusia yang sedang berada di AS dan melakukan pencegahan apabila terdapat warga AS yang hendak melakukan bisnis dengan orang-orang Rusia dan Ukraina. Bahkan, AS juga akan mempersiapkan sebuah dasar hukum untuk mengenakan sanksi lebih lanjut terhadap individu yang

menyalahgunakan aset negara Ukraina atau telah menegaskan kekuasaan atas bagian tertentu dari negara Ukraina tanpa persetujuan pemerintah baru di Kiev.

Respons keras dari AS ini pun tidak jauh berbeda dengan respons UE. Dewan UE mengatakan bahwa mereka mengutuk semua bentuk kekerasan yang telah menimpa negara Ukraina. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan 2014/119/CFSP, Dewan UE memutuskan untuk membekukan dana dan aset dari 18 orang yang telah menyalahgunakan dana negara Ukraina dan atas kekerasan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi selama aksi unjuk rasa menentang pemerintahan.

Meski menimbulkan kesulitan ekonomi di Eropa, langkah lanjut UE dengan melakukan penekanan terhadap impor gas alam Rusia di Eropa mulai membuahkan hasil. Rusia merupakan pemasok besar kebutuhan gas alam Eropa. Di mana sekitar 80 persennya disalurkan melalui Ukraina. Konflik Ukraina telah mengganggu instabilitas ekspor gas Rusia ke Eropa sehingga perekonomian Rusia terganggu. Di lain pihak, upaya Rusia mencari rute baru dalam penyaluran gas alamnya melalui Bulgaria telah terhenti. Di bawah tekanan UE, Bulgaria menghentikan kesepakatan proyek jalur gas alam rute selatan dengan Rusia, dengan menanggihkan proyek pipanisasi '*South Stream*' di wilayahnya. Terhentinya proyek ini, disaat jalur ekspornya di Ukraina belum pulih, sangat mengganggu perekonomian Rusia yang sudah diambang resesi. Singkatnya, sanksi ekonomi dan tekanan politik UE telah merusak perekonomian Rusia yang sudah diambang resesi.

Menghadapi tekanan politik dan ekonomi terhadap negaranya, Presiden Rusia Vladimir Putin mulai bersikap pragmatis dengan menyerukan perbaikan hubungan antara Rusia dan AS. Putin memosisikan Rusia sebagai mitra sejajar yang harus bekerja sama mengemban tanggung jawab menjaga keamanan global.

Penguasaan Kembali Wilayah Timur Ukraina

Solusi damai UE dengan pemberlakuan gencatan senjata yang berlaku selama 10 hari telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Atas desakan Jerman dan Perancis, Rusia bersedia melanjutkan gencatan senjata tersebut. Di lain pihak, Presiden Ukraina Petro Poroshenko dan Dewan Keamanan Nasional Ukraina menolak memperpanjang gencatan senjata karena menilainya gagal untuk membendung pertempuran. Juru bicara militer Ukraina melaporkan, selama masa gencatan senjata, pemberontak meluncurkan misil dan merusak sebuah pesawat SU-24. Presiden Poroshenko menilai rencana perdamaian yang diusulkannya justru digunakan gerakan separatisme pro Rusia untuk menambah pasokan senjata dari Rusia.

Dalam gelar Operasi Anti Terorisme, pihak militer berhasil menguasai kota Slavyansk dan Kramatorsk yang merupakan pusat gerakan separatistis pro Rusia. Secara simbolis ini menjadi kemenangan bagi Pemerintah Ukraina melawan separatisme di negaranya. Sebagian dari pihak separatistis pro Rusia menyerahkan diri dan memberikan informasi bahwa telah terbentuk kekuatan baru separatistis di kota-kota besar lainnya di timur Ukraina. Pemerintah Ukraina akan melanjutkan operasi militer tersebut hingga wilayah-wilayah yang dikuasai gerakan separatistis berhasil dikuasai pemerintah. Langkah Presiden Ukraina Petro Poroshenko ini didukung AS, namun dikecam keras Presiden Rusia Vladimir Putin, yang menyebut Poroshenko telah merusak jalan menuju perdamaian.

Kelompok separatistis pro Rusia merasa frustrasi akan janji kosong Vladimir Putin untuk mempertahankan wilayah timur Ukraina. Menghadapi serangan Pemerintah Ukraina, gerakan separatistis pro Rusia di bawah pimpinan Igor Girkin melakukan langkah mundur dan mengonsolidasikan diri di kota Donetsk yang merupakan kota industri alat berat Ukraina. Pemerintah Ukraina akan mengirimkan pasukan khusus dalam serangan di Donetsk untuk menghindari kehancuran kota penting ini. Referendum pro Rusia di wilayah Donetsk dilakukan secara sepihak Mei lalu tanpa kehadiran pengamat independen.

Kemenangan awal pemerintah Ukraina diperkirakan akan menjadi tambahan tekanan terhadap Rusia untuk menghentikan dukungannya kepada gerakan separatistis pro Rusia di Ukraina. Secara terbuka Rusia

menyatakan hanya memberikan bantuan kemanusiaan kepada kelompok separatis, namun pihak Barat menyatakan Rusia secara reguler memberikan bantuan senjata. Kebijakan Putin tersebut telah dikritik dan tidak mendapat banyak dukungan dalam negeri. Dengan demikian diperkirakan operasi militer pemerintah Ukraina akan segera dapat mengalahkan gerakan separatis pro Rusia di negaranya. Namun, perjuangan panjang pemerintah Ukraina untuk melakukan rekonsiliasi di wilayah-wilayah separatis pro Rusia akan membutuhkan waktu yang lama.

Penutup

Dalam menyikapi krisis Ukraina ini Indonesia tidak secara tegas mengecam kebijakan Rusia atas Ukraina. Indonesia cukup mengedepankan dukungan terhadap prinsip kedaulatan negara dan mengedepankan prinsip integritas wilayah suatu negara. Indonesia tidak bisa menerima langkah apapun yang melanggar kedaulatan dan keutuhan wilayah dari Ukraina. Selain itu, Indonesia senantiasa mengedepankan prinsip penghormatan dan demokrasi dan kepatuhan terhadap konsitusi.

Indonesia menegaskan dalam menghadapi berbagai situasi serupa di manapun di berbagai kawasan, akan berprinsip menghormati kedaulatan dan integritas wilayah sebagai dasar hubungan antar-bangsa. Indonesia meminta Rusia dan AS sebagai negara adidaya untuk mengedepankan langkah penyelesaian konflik melalui jalur damai dan menghormati hukum internasional tanpa pengerahan kekuatan militer. Indonesia juga menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak dan memikul tanggung jawabnya sesuai piagam untuk memelihara perdamaian internasional. Dalam hal ini Indonesia dapat mengusulkan penurunan pasukan perdamaian PBB menyusul meredanya konflik militer di wilayah timur Ukraina.

Referensi

- “Rusia didesak untuk menekan pemberontak”, *Kompas*, 1 Juli 2014;
- “Ukraina Luncurkan Serangan”, *Kompas*, 2 Juli 2014;
- “Uni Eropa Ultimatum Rusia”, *Suara Pembaruan*, 28-29 Juni 2014;
- “NATO setuju tambahan anggaran militer”, *Suara Pembaruan*, 27 Juni 2014;
- “Heavy Clashes as Ukraine ends cease-fire”, *International Herald Tribune*, 2 Juli 2014;
- “A pipeline in political cross hairs”, *International Herald Tribune*, 2 Juli 2014;
- “Ukraine’s Secret Weapon Against Putin: Feisty Tycoon”, *The Wall Street Journal*, 2 Juli 2014;
- “Ukraina hentikan gencatan senjata”, *Republika*, 2 Juli 2014;
- “Presiden Ukraina Perintahkan serang Separatis”, *Suara Pembaruan*, 1 Juli 2014;
- “Slavyansk Direbut Kembali”, *Kompas*, 7 Juli 2014;
- “Putin tells Obama he wants better ties, equal treatment”, *The Jakarta Post*, 5 Juli 2014;
- “Kiev Troops Advance on Rebel Bastion”, *The Wall Street Journal*, 7 Juli 2014.